

### **BAB III**

## **DINAMIKA SOSIAL POLITIK QATAR**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai geografis di negara Qatar, sistem politik yang berkaitan dengan pemerintahan dan kebijakan luar negeri negara Qatar. kemudian dalam bab ini juga penulis menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi Qatar dari tahun 1971 hingga 2017, serta kekuatan militer negara Qatar, juga dinamika hubungan Arab Saudi dengan Qatar.

Qatar adalah sebuah negara yang meskipun kewenangan berada di tangan Emir sepenuhnya akan tetapi tetap menerapkan pemilu di negaranya. Dalam politik luar negerinya Qatar menerapkan realisme dan juga *soft power*.

selain itu Qatar juga termasuk dalam daftar negara kaya dengan pendapatan produk domestik bruto (PDB) per kapita tertinggi di dunia. Qatar hanya membutuhkan waktu satu setengah dasawarsa untuk membangun perekonomiannya, dan hal ini dinilai tumbuh secara signifikan dalam kurun waktu cepat (DW- Breaking World News, 2017).

Dalam segi pertahanan, Qatar tidak memosisikan negaranya untuk bisa menjadi yang super power di kawasan Teluk, akan tetapi perlahan yang ia miliki mampu menjaga kedaulatannya (Anthony H. Cordesman, *The Gulf Military Forces in an Era of Asymmetric War*, 2006).

Kemudian, hubungan diplomatik Arab Saudi dan Qatar sudah terjalin cukup lama. Sebelumnya di tahun 2014 hubungan kedua negara sempat memanas yang kemudian ditandai dengan putusannya hubungan diplomatik di antara keduanya. Kejadian serupa kemudian terjadi tahun 2017 dimana kedua negara kembali memutuskan hubungan diplomatik dengan alasan hal-hal yang dilakukan oleh Qatar dianggap mengancam keamanan Arab Saudi dan stabilitas kawasan di Timur Tengah.

## A. Qatar Dalam Segi Geografis, Politik, Ekonomi Dan Keamanan

### 1. Geografis Negara Qatar

Qatar merupakan sebuah negara yang berbentuk Keamiran. Letak ibu kota negara Qatar berada di Doha. Luas wilayah negara Qatar yakni 11.437 km<sup>2</sup>. Negara ini berbatasan dengan Teluk Persia di bagian Utara, Timur dan Barat, serta Arab Saudi dan Uni Emirat Arab di bagian Selatan. Dari segi iklim negara Qatar memiliki dua musim, yakni musim panas yang terjadi pada bulan Juni hingga September dengan maksimal suhu 50° C dan musim dingin yang terjadi pada bulan Oktober hingga Mei dengan maksimal suhu 30° C dan suhu minimal 7° C, serta curah hujan 70 mm per tahun (KBRI Qatar, 2015). Jumlah penduduk Qatar terhitung sejak Juli tahun 2017 berjumlah 2.314.307 jiwa. Agama Penduduk negara Qatar terdiri dari muslim 67,7%, Kristen 13,8%, Hindu 13,8%, Budha 3,1%, *Folk Religion* < 1%, lainnya 0,7% dan Atheis 0,9%, hal ini terhitung sejak tahun 2010. Bahasa sehari-hari penduduk Qatar adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk bahasa kedua (Central Intelligence Agency, 2018).

### 2. Sistem Pemerintahan Negara Qatar

Susunan pemerintahan Qatar terdiri dari *Ministers*, *supreme councils*, dan lembaga lainnya. Kemudian sistem pemerintahan negara Qatar didasarkan atas pemisahan dan penggabungan kekuasaan. Dimana kekuasaan tertinggi yaitu kekuasaan eksekutif dimiliki oleh Emir dan pewaris yang ditunjuk, akan tetapi Qatar dalam praktik kenegaraannya tetap menghargai adanya konstitusi. Sedangkan kekuasaan legislatif dimiliki oleh *Advisory Council* (Hukoomi Qatar e-Government, 2018).

Berbicara kewenangan eksekutif, di negara Qatar badan eksekutif tertinggi yakni adalah kepala negara Qatar yang dipimpin oleh Emir. Emir memiliki wewenang dalam mengatur urusan internal, eksternal dan segala urusan

hubungan antar mancanegara. Selain itu Emir juga memiliki wewenang dalam mengatur angkatan bersenjata di Qatar yang dibantu oleh dewan keamanan Qatar, beliau juga berkedudukan sebagai panglima tertinggi. Emir juga memiliki wewenang terkait dengan putusan akhir dalam proses hukum di negara Qatar meskipun segala proses hukum berada di bawah naungan lembaga hukum (Hukoomi Qatar e-Government, 2018).

Dalam kerjanya Emir di bantu oleh *Council of Ministers*, kabinet, *Prime Minister* dan enam *supreme councils*. Yang mana *Ministers* dan *Prime Minister* tersebut ditunjuk oleh Emir, sehingga dalam hal ini Emir berhak memberikan pemberhentian atas jabatan mereka. Tugas utama *Prime Minister* di Qatar adalah memimpin jalannya sebuah sidang yang dilakukan oleh *Ministers* dan mengawasi koordinasi kerja antar jajaran *Ministers* guna mengintegrasikan seluruh cabang pemerintah, serta menandatangani resolusi yang dikeluarkan oleh *Ministers* (Hukoomi Qatar e-Government, 2018).

Kemudian kabinet juga dibentuk oleh Emir berdasarkan usul yang diajukan oleh *Prime Minister*. Tanggung jawab dan wewenang *Ministers* serta departemen di atur oleh undang-undang pemerintah Qatar. seorang *Ministers* di Qatar juga menduduki kekuasaan eksekutif setelah Emir, yang mana tugas mereka adalah memantau seluruh urusan internal dan eksternal dalam yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan konstitusi dan hukum negara Qatar, serta *Ministers* dan jajaran pemerintah lainnya bertanggung jawab untuk menjalankan program dan kebijakan publik (Hukoomi Qatar e-Government, 2018).

Berkaitan dengan konstitusi negara Qatar secara umum, pertama kali dikeluarkan sebelum terjadinya kemerdekaan negara Qatar yakni pada tahun 1970, dan

kemudian disempurnakan pada tahun 1972 pasca kemerdekaan guna menghadapi fase baru di negaranya. Di tahun 1999 Qatar mengadakan pemilu untuk pertama kalinya yang bertujuan untuk membentuk *Central Municipal Council*. Hingga di tahun 2008 Qatar melakukan penataan ulang pada ketatanegaraannya dengan beralih pada *ministry portfolio-based*. Sehingga dalam hal ini *Ministers* bertanggung jawab atas kebijakan tertentu. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama antar departemen dan mengurangi fragmentasi dalam pengambilan keputusan (Hukoomi Qatar e-Goverment, 2018).

Selanjutnya, dalam proses perumusan konstitusi di negara Qatar, pada bulan Juli tahun 1999 Emir membuat sebuah komite yang bertujuan untuk merancang adanya konstitusi permanen di negara Qatar. Prinsip tersebut berkenaan dengan Qatar ke dunia Arab dan ajaran-ajaran Islam. Di tanggal 29 April 2003 terdapat sebuah referendum publik yang menyetujui konstitusi baru tersebut dan 8 Juni 2004 Emir menetapkan konstitusi tetap negara Qatar untuk disahkan. Konstitusi tersebut berisi bahwa Qatar merupakan negara yang berdaulat independen. Agama di negara tersebut adalah Islam, dengan sistem politik demokratis (Hukoomi Qatar e-Goverment, 2018).

Undang-undang negara Qatar berpacuan dengan hukum syariah. Bahasa resmi negara Qatar adalah bahasa arab. Penduduk negara Qatar merupakan sumber kekuatan dan pemerintahan negara Qatar didasarkan atas pemisahan kekuasaan. Dalam konstitusi tersebut juga berisi adanya pembentukan *Advisory Council*, yang mana dalam penunjukan *Advisory Council* tersebut, dua pertiga di antaranya dipilih dan sisanya ditunjuk oleh Emir. Selain itu dijelaskan juga bahwa konstitusi negara Qatar menjunjung tinggi kebebasan pribadi, hak keamanan, semua warga negara Qatar memperoleh kesetaraan, melindungi kepemilikan pribadi, melindungi kebebasan berekspresi,

pers, agama, dan hak untuk memperoleh pendidikan (Hukoomi Qatar e-Government, 2018). Kemudian juga dijelaskan bahwa kekuasaan eksekutif dipegang oleh Emir dengan aturan secara turun-temurun mengikuti keturunan laki-laki keluarga Al-Thani yang diwarisi oleh putra bernama Heir Apparent (seorang muslim dari rahim ibu muslim Qatari) oleh Emir. Sedangkan kewenangan legislatif dipegang oleh *Municipal Council*. Dalam konteks peradilan kekuasaan tertinggi berada di pengadilan. Selain itu hanya orang-orang berkewarganegaraan Qatar yang boleh menduduki jabatan *Ministers*. Dijelaskan juga dalam konstitusinya, masyarakat Qatar didasarkan atas nilai keadilan, kebajikan, kebebasan, persamaan dan moral yang tinggi, serta keluarga adalah basis masyarakat. Dalam kebijakan luar negerinya yang dijelaskan dalam konstitusi tersebut, kebijakan luar negeri Qatar didasarkan atas prinsip penguatan perdamaian dan keamanan internasional, serta warga negara Qatar berkewajiban untuk membela negara Qatar (Hukoomi Qatar e-Government, 2018).

Kemudian berbicara soal kekuasaan legislatif di Qatar, yakni dimiliki oleh *Advisory Council*. *Advisory Council* sendiri terdiri dari 45 anggota, dimana tugas mereka diantaranya:

- a) Membahas mengenai perundang-undangan mengenai Dekrit Emir.
- b) Membahas kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi, administrasi dan politik
- c) Membahas segala urusan negara yang menyangkut persoalan sosial dan budaya secara umum dalam segi inisiatif ataupun yang disebut oleh kabinet *ministry*
- d) Membahas anggaran umum yang bertujuan untuk publik
- e) Membahas tentang pendanaan *Council*
- f) Menindak lanjuti isu-isu yang dibahas oleh kabinet dan kemudian mengontrol kemajuannya

- g) Memastikan kebenaran suatu isu dengan mengklarifikasi berkali-kali
- h) Meminta informasi tambahan terkait dengan kebijakan pemerintah dan *ministry*
- i) Menyarankan solusi terhadap masalah-masalah yang terkait di atas (Hukoomi Qatar e-Government, 2018).

Selain itu berkaitan dengan *Municipal Council*, di negara Qatar *Municipal Council* berdiri pada tahun 1950an, sehingga dari berdirinya *Council* tersebut pada tahun 1999 untuk pertama kalinya negara Qatar mengadakan pemilu guna membentuk *Central Municipal Council* (CMC). Dimana pemilu CMC tersebut diadakan selama empat tahun sekali. *Council* tersebut terdiri 29 anggota terpilih yang mewakili setiap daerah pemilihan di negara Qatar. Tugas mereka tidak lain, yakni menentukan program dan mengira-ngira kerja mereka, memberikan usulan kepada *Ministry*, dan mengadakan rapat dua minggu sekali di Doha yang dilakukan di hadapan umum dengan keteraturan dua pertiga anggota. Selain itu kewenangan dan tanggung CMC adalah sebagai berikut:

- a) Memantau pelaksanaan undang-undang berkenaan keputusan dan peraturan yang berkaitan dengan perkotaan, industri, infrastruktur, serta sistem publik lainnya.
- b) Mengawasi pengelolaan ekonomi, keuangan dan administrasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan kota, serta pertanian (Hukoomi Qatar e-Government, 2018).

### 3. Politik Luar Negeri Qatar

Pasca terjadinya *Arab Spring*, Qatar banyak menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa negara, beberapa diantaranya adalah negara-negara Teluk, Iran, dan Amerika Serikat (Kaussler, 2015). Selain itu Qatar juga memiliki kedekatan dengan beberapa kelompok yang dianggap ekstrem oleh Arab Saudi seperti Ikhwanul Muslimin, Hamaz (Counter

Extremism Project, 2017) dan Hizbullah (Yaya J. Fanusie, 2017). Kemudian, Qatar juga mengimplementasikan Realisme dalam politik luar negerinya, dikatakan demikian karena meskipun Qatar negara yang relatif kecil namun Qatar merupakan negara yang independen. Dalam artian bahwa Qatar tidak perlu mengandalkan negara lain untuk mempertahankan negaranya. Dalam politik luar negeri Qatar juga mengimplementasikan politik luar negeri yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- a) Melihat keuntungan ekonomi, politik, dan keamanan yang akan diperoleh negaranya ketika ia menjalin hubungan dengan negara lain
- b) Keabsahan politik dalam negeri negara Qatar pada *Arab Spring* membuat negara ini tidak hanya mendukung aktor non negara dan gerakan yang mendukung demokrasi di seluruh wilayah, akan tetapi Qatar juga mendukung kemanusiaan dalam krisis global
- c) Kebijakan luar negeri Qatar juga dibentuk dari aspek wilayah Timur Tengah
- d) Menjadikan kekuatan eksternal dalam negerinya sebagai langkah untuk menyatukan kepentingan dalam lingkup regional Timur Tengah
- e) Dalam kebijakan luar negeri Qatar, meskipun Qatar menganut realis akan tetapi Qatar juga menerapkan kebijakan luar negeri yang dapat dikategorikan *soft power*
- f) Dalam politik luar negerinya juga Qatar mendukung segala bentuk politik yang bersih
- g) Qatar juga menghormati segala bentuk mazhab yang dianut oleh umat di dunia
- h) Qatar juga menolak jika dalam regional Arab terpecah-pecah dalam sektarianisme atau doktrin karena bagi Qatar apabila itu terjadi akan memberikan dampak terhadap imunitas sosial dan ekonomi (Kaussler, 2015).

#### 4. Perkembangan Ekonomi Negara Qatar dari 1971-2017

Tidak dapat ditutupi bahwa keberhasilan Qatar disebabkan oleh kepemilikan hidrokarbon di negaranya. Keberhasilan tersebut merupakan buah dari seorang pemimpin nasional yang visioner dan mampu berkomitmen. Menjalinkan hubungan yang kuat dan menguntungkan dengan mitra internasional juga dilakukan oleh pemimpin negara Qatar. Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari peran Geopolitik negara-negara Teluk akan permintaan pasar mereka terhadap energi yang dimiliki oleh Qatar. Kesuksesan Qatar dapat terlihat jelas dari segi latar belakang negara tersebut. Dimana pada tahun 1971 ditemukan tempat penyimpanan cadangan terbesar di negara ini. Akan tetapi meskipun sumber daya gas yang cukup besar, lokasi Qatar yang cukup jauh dari daerah pasar utama, penilaian terhadap kelayakan dan teknis yang salah, serta tantangan mengenai pendanaan akan berdampak terhadap pengolahan sumber itu sendiri (Ibrahim, *Qatar's Economy: Past, Present, and Future*, 2012).

Pada awal tahun 1990an menjadi tahap awal negara Qatar melakukan pengembangan gas yang bersumber di *north field*. Pengembangan tersebut awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Namun kepemilikan Qatar akan sumber daya yang sangat luas membuat negara ini melakukan eksploitasi guna mengeksport sumber tersebut ke beberapa negara. Negara-negara Teluk menjadi rencana awal bagi Qatar untuk memasok sumber-sumber tersebut melalui jaringan pipa. Qatar memerlukan waktu selama lebih dari satu dekade untuk bisa mengendalikan apa yang menjadi penghambat ekspor *Liquefied natural gas* (LNG). Sampai pada akhir 1990an, negara ini melihat kesempatan untuk melakukan perluasan pasar dengan mengubah lean gas menjadi bahan bakar gas ke cair (GTL) (Ibrahim, *Qatar's Economy: Past, Present, and Future*, 2012).

Kemudian, untuk pertama kalinya di tahun 1997 Qatar berhasil mengirimkan produk LNG ke Jepang. Hal tersebut terjadi berkat komitmen kepemimpinan dan ketekunan,



terciptanya infrastruktur yang vital, terbukanya pasokan gas yang handal di Timur Tengah, serta hubungan mitra yang sukses terhadap perusahaan minyak internasional sehingga memungkinkan Qatar untuk menjual gas alam cairnya (Ibrahim, *Qatar's Economy: Past, Present, and Future*, 2012).

Di tahun 2003 Qatar mulai membangun sebuah pabrik GTL pertama di dunia, tujuan negara Qatar tidak lain adalah untuk di memasarkan produk tersebut. Dan benar saja, di tahun 2007 pabrik tersebut mulai beroperasi, yang kemudian di produksi pada tahun 2011. Pada masa itu Qatar menjadi pengeksport LNG dan GTL terbesar di dunia, dimana hasil tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan fiskal negara Qatar. Qatar mampu menduduki negara dengan peringkat teratas dalam hal pendapatan per kapita. Pertumbuhan tersebut terjadi sejak tahun 2000, dimana perekonomian Qatar tumbuh lebih cepat dari sebelumnya (Ibrahim, *Qatar's Economy: Past, Present, and Future*, 2012).

Selain itu Qatar juga tidak hanya terpaku pada sumber minyak yang mereka miliki, Qatar juga berpikir mengenai generasi-generasi penerus mereka. Oleh sebab itu pemerintah Qatar memberikan pendanaan layanan kesehatan dan pendidikan bagi warga negaranya guna membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Tidak hanya itu, usaha lain yang di miliki negara ini adalah kepemilikan maskapai *Qatar Airways* yang dimulai sejak tahun 1994. Selain itu di tahun 1996 negara ini memiliki jaringan stasiun televisi Al-jazeera yang sampai saat ini terus berkembang secara global. Dalam bidang teknologi juga tidak ketinggalan, pada tahun 2004 negara ini mendirikan *Qatar Science Technology Park* yang tujuan dibuatnya adalah untuk inovasi teknologi dan komersialisasi. di tahun yang sama yakni tahun 2004 negara ini juga mendirikan ICT Qatar, hal tersebut dibentuk lantaran kesadarannya akan pentingnya teknologi dan komunikasi guna menuju masa depan yang sejahtera. Kemudian di tahun 2005 Qatar mendirikan *Qatar Financial Centre Authority*, hal ini

merupakan program pemerintah untuk mempromosikan pengembangan industri jasa keuangan. Akan tetapi terlepas dari keberhasilan negara Qatar dari tahun 2000 hingga tahun 2007 memunculkan tekanan terhadap negara itu sendiri. Dimana penduduk Qatar menjadi minoritas di negara mereka sendiri dan menghadapi tantangan dalam melestarikan tradisi dan nilai yang mereka hargai. Meningkatnya populasi yang berkembang cukup pesat berdampak terhadap sumber daya alam dan lingkungan mereka. Hal tersebut membuat sulit *public sector institutions* negara Qatar dalam menangani tuntutan baru yang meluas. Faktanya, bagi Qatar mengembangkan institusi dan kapasitas administratif sebuah negara modern jauh lebih sulit, karena akan memakan waktu yang cukup lama. Dibandingkan dengan membangun industri hidrokarbon yang kompetitif dalam taraf internasional. Sehingga pada tahun 2008 negara ini mengadakan sebuah program reformasi sektor publik yang komprehensif guna merasionalisasi pemerintah dan meningkatkan layanan publik (Ibrahim, Qatar's Economy Past, Present and Future , 2011).

Sebelumnya, di tahun 2007 pemerintah Qatar juga membentuk *General Secretariat for Development Planning (GSDP)*. Pembentukan ini sebagai tujuan negara Qatar untuk mengemukakan ide-ide atau gagasan dan kepemimpinan strategis yang berkaitan dengan isu-isu pembangunan nasional. Selain itu, dibentuknya *General Secretariat for Development Planning (GSDP)* tidak lain untuk merancang ingin seperti apa negara ini dibuat, dan ini merupakan bagian dari visi Qatar tahun 2030 mendatang. Dalam visi ini dijelaskan bahwa perlunya komitmen konstitusi terhadap masyarakat yang adil dan aman. Masyarakat dituntut untuk melestarikan warisan kekayaan dan meninggalkan warisan yang tidak berkelanjutan untuk generasi-generasi di masa depan. Maksud dalam berkelanjutan tersebut, ialah yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, manusia dan lingkungan yang luas, serta masyarakat dituntut untuk memiliki rasa saling bergantung satu sama lain. Strategi ini kemudian diluncurkan oleh Qatar di tahun 2011

sebagai strategi pembangunan nasional 2011-2016 (Ibrahim, Qatar's Economy Past Present and Future, 2011).

Di tahun 2016 terjadinya penurunan harga minyak dunia yang disebabkan oleh kelebihan pasokan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Qatar. Dimana Produk Domestik Bruto (PDB) negara ini menjadi lambat yang berkisar 2,2% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 2015 yang berkisar 3,6%. Namun, karena negara ini tidak hanya mengandalkan hasil bumi mereka, maka pertumbuhan ekonomi negara ini tetap tumbuh yang diperoleh dari hasil non hidrokarbon sebesar 5,6%. Sektor non hidrokarbon tersebut berkaitan dengan konstruksi yang di dukung oleh proyek-proyek infrastruktur, peningkatan populasi yang menyebabkan terciptanya akan permintaan jasa keuangan, pemerintah dan real Estate (Qatar National Bank (QNB), 2017).

Akan tetapi di tahun 2017 terjadinya konflik oleh sejumlah negara teluk termasuk Arab Saudi yang mengeluarkan kebijakan pemutusan hubungan diplomatik beserta Mesir kepada Qatar membuat negara-negara tersebut melakukan pemberlakuan yakni menutup segala akses baik darat, udara dan laut ke negara Qatar, sehingga hal ini memberikan dampak terhadap laju pertumbuhan negara Qatar, baik dalam sektor bisnis maupun pendapatan negara. Dari permasalahan ini pemerintah Qatar harus menaikkan subsidi agar dapat mengimbangi kenaikan harga yang akan terjadi dari pemboikotan yang dilakukan oleh beberapa negara teluk dan Mesir (Heritage Foundation, 2018).

Dalam kasus pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Arab Saudi dan negara-negara teluk lainnya memberikan dampak yang cepat terhadap negara Qatar, terutama pada perekonomian negara Qatar baik untuk kurun waktu yang lama maupun singkat. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya *brent crude oil* sebanyak 1,6% dengan total harga 50,74\$ per barel di *ICE Futures Europe exchange*

yang bertempat di London. Selain itu, ketidakefektifan bank sentral dalam mencegah penurunan suplai uang sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan saham di negara Qatar sebanyak 8% (Amman, 2017).

Tidak hanya itu, dampak perekonomian lainnya juga dirasakan dalam segi penerbangan yang turut terlibat sebagai efek dari pemboikotan jalur udara yang dilakukan oleh Arab Saudi dan sejumlah negara Teluk lainnya, serta pelarangan maskapai Qatar Airways untuk beroperasi di wilayah tersebut. Qatar Airways yang merupakan salah satu maskapai terbesar di dunia milik pemerintah Qatar kehilangan pendapatan dari Arab Saudi dan negara Teluk lainnya. Selain itu blokade udara tersebut juga membuat jalur penerbangan Qatar Airways harus memutar sehingga akan memakan waktu yang lama dan membutuhkan bahan bakar pesawat yang lebih banyak, hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap harga tiket maskapai yang menjadi lebih mahal (Amman, 2017).

Selain itu pemblokiran jalur darat yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Qatar turut memberikan dampak terhadap perekonomian Qatar. Arab Saudi yang merupakan penghubung terhadap negara lain melalui jalur darat satu-satunya tidak dapat lagi di akses. Akibatnya pengiriman bentuk apapun harus melalui jalur udara dan laut, sehingga nantinya akan menekan biaya impor yang jauh lebih mahal, hal ini akan berakibat inflasi langsung terhadap perekonomian negara Qatar. apalagi pada produk makanan, lantaran Qatar mengimpor makannya terhadap Arab Saudi sebanyak 40%. Begitu pun pada proyek konstruksi untuk piala dunia sepak bola tahun 2022 yang sedang di bangun oleh pemerintah Qatar, blokade tersebut membuat pembangunan tersebut terhambat karena biaya material konstruksi yang lebih mahal (Amman, 2017).

##### 5. Kekuatan Militer Negara Qatar

Angkatan bersenjata negara Qatar adalah pasukan militer Qatar yang dipimpin oleh Emir sejak tahun 1995, dimana

jabatan tertinggi atau komando tertinggi diduduki oleh Emir. Angkatan bersenjata negara ini terbagi menjadi tiga, yakni *Qatari Amiri Land Force* (QALF), *Qatari Amiri Navy* (QAN), *Qatari Amiri Air Force* (QAAF) (Anthony H. Cordesman, *The Gulf Military Forces in an Era of Asymmetric War*, 2006). Negara Qatar memiliki pasukan militer sebesar 104.100 personil, termasuk diantaranya *Qatari Amiri Land Force* (QALF) dengan jumlah 65.000 personil, *Qatari Amiri Navy* (QAN) berjumlah 21.400 personil, pengawal Emir berjumlah 20.400 personil, *Internal Security Force* berjumlah 15.000 personil dan *Qatari Amiri Air Force* (QAAF) berjumlah 3.700 personil (Global Fire Power, 2018). Sejak tahun 2015 negara Qatar mewajibkan wajib militer bagi warga negaranya yang berumur 18-35 tahun dengan target 2000 lulusan per tahun. warga negara Qatar akan di latih selama tiga bulan bagi mereka yang lulusan perguruan tinggi dan empat bulan bagi mereka yang lulusan sekolah menengah atas. Namun dalam Undang-Undang di negara Qatar mengenai wajib militer terdapat perkecualian untuk tidak mengikuti wajib militer bagi warga negaranya yang gagal pada tahap tes kesehatan dan mereka yang tidak memiliki keluarga atau saudara. Akan tetapi apabila mereka warga negara Qatar di luar dari pengecualian tersebut tidak mengikuti wajib militer akan dikenakan sanksi, yakni satu bulan penjara dan denda QS50.000 (Scott, 2015).

Dalam segi perlahan negara ini, Emir selaku komando tertinggi juga tentunya dibantu oleh *defense Council*. *defense Council* sendiri bertugas memberi nasehat-nasehat atau pendapat-pendapat yang berkaitan dengan pertahanan negara Qatar kepada Emir. Selain itu Emir juga di bantu oleh *minister of interior* yang tugasnya adalah menjaga perlahan sipil. Dan Emir juga dibantu oleh polisi nasional negara Qatar. Berkaitan dengan pasukan persenjataan negar Qatar, mereka ditugaskan untuk menjaga negara ini dari serangan dan ancaman yang membahayakan negara, melindungi Emir dan keluarga kerajaan, serta yang paling utama adalah melindungi

apa yang menjadi penunjang perekonomian negara Qatar (Public Intelligence, 2002).

Dalam melindungi apa yang menjadi sumber perekonomian negara, Qatar menugaskan angkatan khusus, seperti Unit Pengawal Sumur Minyak yang berada di daerah Dukhan dan Umm Bab. Angkatan khusus ini dimandatkan untuk mengamankan jaringan pipa di Doha dan Umm Said. Selain perihal penjagaan sumber ekonomi negara ini, Qatar juga memperketat angkatan mereka untuk melakukan penjagaan perbatasan negara Qatar. Hal ini dipicu oleh serangan teroris terhadap negara ini di tahun 2005. Sehingga negara ini memperkuat sistem keamanan mereka (Anthony H. Cordesman, *The Gulf Military Forces in an Era of Asymmetric War*, 2006).

Memiliki negara yang kecil, membuat negara ini tidak memosisikan negaranya sebagai negara terkuat dalam urusan militer di wilayah Teluk. Akan tetapi meskipun demikian negara ini memiliki pertahanan yang cukup untuk melindungi negaranya. Dalam urusan perlahan, Qatar juga memperoleh keamanan dari Amerika Serikat secara de facto (Anthony H. Cordesman, *The Gulf Military Forces in an Era of Asymmetric War*, 2006), karena pada kenyataannya pangkalan militer Amerika Serikat yang bertempat di Qatar sudah sejak tahun 2003. Pangkalan militer Amerika Serikat merupakan pangkalan militer terbesar di Timur Tengah dengan personel militer sebanyak 11.000 dan lebih dari 100 pesawat tempur Amerika Serikat yang bertempat di Qatar (Winardi, 2017).

## **B. Dinamika Hubungan Arab Saudi Dengan Qatar**

Konflik pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar pada tahun 2017 berawal dari tahun 1970, kedua negara mengalami ketegangan yang pada saat itu dipicu oleh permasalahan perbatasan antara Qatar dan Arab Saudi (Roll, 2017). Di tahun 1995 keduanya kembali mengalami konflik, dimana Qatar mulai menerapkan kebijakan luar negeri yang didasarkan atas kebebasan dan perkembangan dalam

negerinya, serta mulai menyesuaikan kebijakan luar negerinya terhadap negara lain. Selain itu, Qatar yang mulai menjalin hubungan kuat dengan Amerika Serikat dan juga menjalin hubungan dengan musuh-musuh lama Amerika Serikat dinilai sebagai akar mulanya konflik permasalahan ini. Tidak hanya itu, stasiun televisi yang didirikan oleh pemerintah Qatar, Al Jazeera juga turut menjadi akar permulaan konflik tersebut. Lantaran stasiun televisi Al Jazeera kerap menayangkan acara-acara yang tidak pantas untuk di bahas di wilayah Arab. Sehingga hal tersebut menuai kritik dari para ilmuwan-ilmuan Arab dan aktivis politik. Kemudian, keterbukaan negara Qatar atas kebebasan perempuan dalam ruang publik dan liberalisasi pendidikan dan kampus-kampus di negaranya juga menjadi penyebab awal mula terjadinya permasalahan ini. Bahkan negara Qatar juga memfasilitasi ruang bagi pemuka-pemuka agama muslim yang memiliki pikiran terbuka untuk membantu negaranya dalam merumuskan pemahaman baru tentang Islam. Di saat yang bersamaan, Emir juga membantu dalam pembangunan gereja-gereja Kristen di negaranya, hingga sampai dua dekade terakhir Qatar juga turut mendukung jalannya perlawanan terhadap serangan militer Israel di Lebanon dan Jalur Gaza. Perubahan politik luar negeri negara Qatar yang diawali pada tahun 1995 tersebut membuat negara-negara di Timur Tengah merasa kesal terutama bagi Arab Saudi, sehingga hal tersebut memberikan dampak terhadap hubungan mereka secara periodik (George Doumar, 2017).

Selanjutnya, di tahun 2010 para pemerintah negara-negara Arab termasuk Arab Saudi menuding jika *arab spring* yang terjadi di wilayah Arab disebabkan oleh media milik pemerintah Qatar, yakni Al Jazeera dan keberpihakan Qatar kepada aktor-aktor dan kubu-kubu yang berseberangan dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, seperti Ikhwanul Muslimin. Berkaitan dengan peristiwa tersebut Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menganggap jika keberpihakan Qatar memiliki risiko. Kemudian penyebab lainnya dilontarkan oleh negara-

negara Arab termasuk Arab Saudi berkaitan dengan penilaian Arab Saudi terhadap kebijakan regional Iran yang merupakan ancaman baginya, sehingga membuat keduanya bersitegang. Berbeda dengan Qatar yang justru mulai membangun hubungan dengan Iran, hal ini juga menyebabkan keretakan hubungan Arab Saudi dengan Qatar (Roll, 2017).

Berkaitan dengan gaya Qatar yang mulai mengubah gaya kebijakannya tersebut menjadi dikagumi oleh Barat yang juga diikuti oleh Amerika Serikat. Kemudian, di tahun 2013 melambatnya perubahan yang menyeluruh dan mendasar yang diakibatkan kurangnya gerakan oposisi di Mesir, kesalahan yang dibuat oleh kelompok Islam yang berkuasa di Mesir, kekerasan yang terjadi pada rezim yang memimpin dan adanya ambisi dari kelompok militer yang ingin berkuasa di Mesir membuat Qatar kembali dituding sebagai dalang dari permasalahan tersebut. Begitu pun permodalan yang terjadi di Surian, serangan balik militer terhadap kelompok oposisi terus dilakukan oleh rezim Assad yang mendapat dukungan dari Iran. Qatar kembali di tuding sebagai sumber dari permasalahan tersebut dan menyebabkan keretakan hubungan Qatar dengan negara-negara Teluk. Khususnya bagi Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain yang kemudian memutuskan hubungan diplomatik terhadap Qatar di tahun 2014 (George Doumar, *Crisis In The Gulf Cooperation Council Challenges and Prospects*, 2017).

Selesainya konflik Arab Saudi dan beberapa negara teluk terhadap Qatar di tahun 2014 yang menyebabkan Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik kepada Qatar telah mencapai solusi kembali terulang di tahun 2017. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari isu-isu regional kawasan Teluk yang diantaranya adalah permasalahan mengenai Iran dan perang melawan terorisme (George Doumar, *Crisis In The Gulf Cooperation Challenges Prospect*, 2017), serta rasa kekhawatiran Arab Saudi terkait dengan potensi yang dimiliki negara Qatar (Rahayu, 2017). Kasus pemutusan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Qatar pada tahun 2017 ini



merupakan krisis paling serius yang pernah terjadi di kawasan Timur Tengah (Ferida, 2017).

Dalam konflik yang terjadi pada tahun 2017, Arab Saudi tidak hanya memutuskan hubungan diplomatiknya saja, melainkan Ia melakukan blokade kepada Qatar dengan menutup penerbangan baik dari Qatar ke Arab Saudi maupun dari Arab Saudi ke Qatar, menutup perbatasan darat laut dan udara, serta memerintahkan warga negara Qatar yang berada di Arab Saudi untuk segera kembali ke Qatar. begitu pun warga negara Arab Saudi yang berada di Qatar diperintahkan untuk segera kembali ke Arab Saudi (AlJazeera Centre for Studies, 2017)

Terkait dengan Pemutusan hubungan diplomatik dan blokade yang dilakukan Arab Saudi pada tanggal lima Juni 2017 terhadap Qatar, dalam waktu lebih dari dua minggu setelah kejadian tersebut kemudian Arab Saudi memberikan sejumlah tuntutan terhadap Qatar. Tuntutan tersebut dihasilkan dari mediasi yang dilakukan oleh Kuwait dan Amerika Serikat. beberapa tuntutan tersebut diantaranya adalah:

1. Mengurangi hubungan diplomatik Qatar terhadap Iran yang di fokuskan dalam tiga hal, yakni 1) Menutup misi diplomatik Iran di Doha, Qatar; 2) Mengusir anggota pengawal Revolusi Iran dan memotong kerja sama militer, serta intelijen dengan Teheran; 3) Memastikan jika hubungan Qatar terhadap Iran mematuhi sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Internasional tanpa membahayakan negara-negara yang berada di kawasan Teluk (George Doumar, Gulf Crisis Cooperation Council Challenges and Prospect, 2017).
2. Menutup pangkalan militer Turki yang berada di Qatar dan menghentikan segala bentuk kerja sama pertahanan antara Qatar dan Turki, yang mana sebelum terjadinya peristiwa pemutusan hubungan diplomatik ini Turki menambah jumlah pasukan di

3. Qatar dan menawarkan program pendidikan militer di Qatar (DW, 2017). Dalam tuntutan ini juga menggambarkan bahwa hubungan Arab memiliki ketidakharmonisan terhadap Turki. Hal ini dibenarkan dengan ditolakannya beberapa undangan Erdogan yang diberikan ke raja Salman untuk mengunjungi Ankara, Turki (George Doumar, Gulf Cooperation Council Challenges and Prospect, 2017).
4. Menghentikan dukungan dan memutuskan hubungan dengan seluruh organisasi teroris terutama Ikhwanul Muslimin, Al-Qaida, Islamic State dan Hizbullah di Lebanon.
5. Memutuskan hubungan dan pendanaan Qatar terhadap organisasi Teroris baik dalam bentuk kelompok ataupun individu yang diperangi oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, Amerika Serikat dan negara-negara lainnya.
6. Menyerahkan anggota yang di anggap teroris oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain yang menetap di Qatar ke negara asalnya dan membekukan seluruh aset mereka, serta memberikan informasi terkait dengan tempat tinggal, keuangan juga kegiatan yang mereka lakukan (DW, 2017).
7. Tidak lagi melakukan campur tangan terhadap urusan negara-negara yang berdaulat dan tidak memberikan lagi kewarganegaraan terhadap buronan yang berasal dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain, serta mencabut kewarganegaraan asing yang dilarang memiliki kewarganegaraan ganda oleh negara asalnya.
8. Menutup stasiun televisi Al Jazeera dan media lainnya yang di biayai oleh pemerintah Qatar, seperti Arabia21, Rassd, Al-araby Al-jadid dan midle east eye.
9. Menyesuaikan kebijakan Qatar baik dalam segi politik, militer, sosial dan ekonomi terhadap negara-negara Teluk dan negara-negara Arab lainnya, serta

menaati kerja sama ekonomi yang dibuat dengan Arab Saudi pada tahun 2014 (DW, 2017).

10. Menghentikan segala bentuk dukungan Qatar terhadap adapun yang dianggap berseberang oleh Arab Saudi, Uni Emirat, Bahrain dan Mesir. Kemudian menyerahkan informasi secara detail, baik itu dalam bentuk dukungan ataupun kerja sama Qatar dengan oposisi tersebut
11. Membayar reparasi dan kompensasi yang diakibatkan dari jatuhnya korban jiwa atas kebijakan politik Qatar. Dimana nantinya jumlah ganti rugi tersebut akan dibicarakan dengan pemerintah Qatar.
12. Menyetujui seluruh tuntutan Arab Saudi terhadap Qatar dalam waktu sepuluh hari. Apabila Qatar tidak menyetujuinya maka tuntutan ini akan di cabut dan normalisasi digagalkan.
13. Menyetujui adanya audit bulanan wajib selama satu tahun pertama yang akan diberlakukan setelah tuntutan ini disetujui. Kemudian akan ada audit per triwulan di tahun kedua dan selanjutnya Qatar akan diawasi oleh Arab Saudi setiap tahunnya dalam waktu sepuluh tahun ke depan (DW, 2017).

Akan tetapi dalam menanggapi tuntutan Arab Saudi dan koalisinya, Qatar justru menolak dan menginginkan jika Arab Saudi segera mengakhiri pemblokiran yang dilakukan oleh Arab Saudi dan sekutunya karena hal tersebut dianggap tidak rasional (kompas.com, 2017). Selain itu, Qatar juga menyatakan jika tuntutan tersebut merupakan bentuk intervensi Arab Saudi terhadap negaranya (Firmansyah, 2017).